

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA PERKARA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)

OLEH

ADINDA SYELOMITHA ARDHANI

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang terus berkembang, khususnya dengan munculnya praktik perjudian digital melalui aplikasi berbasis teknologi. Transformasi dari perjudian konvensional ke perjudian digital menimbulkan tantangan baru untuk penegakan hukum, karena KUHP selaku regulasi utama masih berfokus pada bentuk perjudian tradisional. Kasus dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, yang melibatkan penggunaan aplikasi *Digital Ludo Dice*, memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik perjudian modern dengan instrumen hukum yang diterapkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP Pada perkara perjudian digital tersebut, dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan dosen hukum pidana, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan hasil penelitian yaitu teori penerapan hukum dan teori dasar pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan jika penerapan Pasal 303 bis KUHP oleh majelis hakim sudah selaras pada unsur-unsur delik, karena terdakwa terbukti menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar hukum. Namun demikian, penerapan pasal tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perjudian berbasis digital yang melibatkan teknologi dan transaksi elektronik. Pertimbangan hukum hakim Pada perkara ini didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan menekankan pada kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan untuk masyarakat.

Adinda Syelomitha Ardhani

Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, lebih cermat dalam memahami posisi hukum serta peran pelaku sebelum menentukan pasal yang diterapkan, terutama dalam membedakan antara penyelenggara dan pemain perjudian digital guna mencegah kesalahan penerapan hukum dan menjamin asas keadilan. Kompleksitas penegakan hukum terhadap perjudian digital menuntut peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, kerja sama lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, pendekatan pertimbangan hakim yang menyeimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis selakumana tercermin dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk perlu dipertahankan dan dijadikan acuan Pada perkara serupa. Penguatan harmonisasi antara ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga diperlukan agar kerangka hukum nasional mampu merespons praktik perjudian digital secara lebih komprehensif, adaptif, serta menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pasal 303 bis KUHP, Perjudian Digital, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA PERKARA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)

By

ADINDA SYELOMITHA ARDHANI

Gambling is a criminal act against public order that continues to develop, particularly with the emergence of digital gambling practices through technology-based applications. The transition from conventional gambling to digital gambling presents new challenges for law enforcement, as the Indonesian Criminal Code (KUHP) primarily regulates traditional forms of gambling. The case examined in Court Decision Number 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, which involved the use of the Digital Ludo Dice application, reflects a discrepancy between modern gambling practices and the legal instruments used to prosecute them. The problems in this study are how Article 303 bis paragraph (1) point 1 of the KUHP is applied to digital gambling cases, and how the panel of judges formulates its legal considerations in imposing the sentence.

This research employs a normative and empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with judges, prosecutors, and criminal law scholars, while secondary data were sourced from legislation and legal literature. The data were analyzed qualitatively by interpreting the findings based on the theory of legal application and the fundamental theory of judicial considerations.

The results of the study show that the application of Article 303 bis of the KUHP by the panel of judges is appropriate, as the defendant was proven to have engaged in illegal gambling activities. However, the application of the article has not fully addressed the complexity of digital-based gambling, which involves technological mechanisms and electronic transactions. The judges' legal considerations in this case were based on juridical, philosophical, and sociological aspects, emphasizing legal certainty, justice, and societal benefit.

Based on the results of this study, it is recommended that law enforcement officials, particularly judges and prosecutors, exercise greater accuracy in understanding the legal position and role of offenders before determining the applicable charges, especially in distinguishing between organizers and player

Adinda Syelomitha Ardhani

in digital gambling cases in order to prevent misapplication of the law and ensure the principle of justice. The complexity of enforcing laws against digital gambling requires the enhancement of law enforcement capacity through training, inter-agency cooperation, and the utilization of information technology. Furthermore, the judicial approach that balances juridical, philosophical, and sociological considerations, as reflected in Decision Number 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, should be maintained and used as a reference in similar cases. Strengthening the harmonization between the provisions of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) is also necessary so that the national legal framework can respond to increasingly complex and modern digital gambling practices in a comprehensive and adaptive manner, while ensuring legal certainty, utility, and substantive justice for society.

Keywords: Article 303 bis of the Criminal Code, Digital Gambling, Judicial Considerations